

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun berkenaan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan Perencanaan Strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-OPD.

Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja RKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain hal tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum Penyusunan Renja-SKPD, adalah :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023; dan
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah memberikan arah dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke dalam rangka Mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan, Tujuannya adalah :

- a. Memberikan Landasan Operasional bagi seluruh unsur pimpinan dan staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama satu tahun.
- b. Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi Kinerja Pimpinan dan Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah:

BAB I	Pendahuluan
	Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
	Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap Rancangan Awal RKPD.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
	Berisi uraian ringkas tentang Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran Pencapaian Renja Perangkat Daerah dan Pendanaan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.
BAB V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1		Penunjang Urusan Pemerintahan								
4	02	Urusan Keuangan								
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah								
		Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	41	41	41	41	100	41	41	100
		Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota Se Jawa Tengah	35	35	35	35	100	35	35	100
		Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah	41	41	41	41	100	41	41	100
		Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	41	41	41	41	100	41	41	100
		Program Pengelolaan Aset Daerah								
		Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4
		Kegiatan Penatausahaan BMD	43	43	43	43	43	43	43	43
		Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	43	43	43	43	43	43	43	43
		Kegiatan Penyelesaian Kasus Sengketa Aset	5	5	5	5	5	5	5	5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Non Urusan									
	Bidang Eks BAU									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pengguna layanan Administrasi Perkantoran								
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos lainnya guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja penggunaan telepon, air, listrik dan internet kantor tercukupi	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	% dari seluruh barang milik daerah terasuransikan untuk 12 bulan	12	12	76	76	100	76	76	100
	Kegiatan Pnyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Tercukupinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/rumah Dinas								
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor tersedia	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat pemenuhan Kebutuhan Barang Cetak tersedia dan kebutuhan penggandaan tergandakan	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung dan halaman kantor tersedia	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersedia								
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna	12	12	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		mendukung kelancaran tugas kedinasan								
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan tersedia	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan makan minum rapat dan makan minum tamu kedinasan terpenuhi	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	Tingkat pemenuhan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan di luar daerah	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tingkat pemenuhan Pemberian honorarium panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang/ jasa, pengelola keuangan SKPD, honor tenaga outsoarching, upah tenaga kerja	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	Tercukupinya kebutuhan Publikasi dan Dokumentasi								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Umur Pakai dan bertambahnya Aset	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bagian perlengkapan gedung kantor yang rusak diperbaiki	12	12	12	12	12	12	60	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya jumlah rumah dinas yang dimiliki	12	12	12	12	12	12	60	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan	Jenis Pemeliharaan kendaraan dinas	12	12	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dnas/operasional	operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan								
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kebutuhan Bahan Bakar genset, pemeliharaan alat pemadam kebakaran ringan, ac central, ac split, instalasi listrik, instalasi air, genset, pompa air dan suku cadang, hidran dan suku cadang, alarm fire dan suku cadang, serta PABX dan suku cadang tersedia	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Seluruh peralatan (lemari es, mesin ketik, dispenser, akuarium, sound system, instalasi telepon, pesawat telepon, LCD proyektor, TV, komputer dan suku cadang,	12	12	12	12	100	12	60	100
		printer serta internet dan suku cadang) dapat digunakan dengan optimal	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	Seluruh Arsip dapat digunakan dengan optimal	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	Jumlah Tanaman dan Taman yang dapat terpelihara dengan baik	12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah meja rapat yang diadakan	12	12	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas pegawai	12	12	12	12	100	12	60	100	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Pegawai									
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	% pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek, seminar, lokakarya dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/ jasa meningkat	12	12	40	40	100	20	30	100	
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	% Pegawai yang mengikuti Sosialisasi terkait Peraturan Perundangan	12	12	12	12	100	12	60	100	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
	Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	- Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan	41	41	41	41	41	41	41	100	
	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota Se Jawa Tengah		35	35	35	35	35	35	35	100	
	Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah		41	41	41	41	41	41	41	41	100
	Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		41	41	41	41	41	41	41	41	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengelolaan Aset Daerah	- Persentase Pemanfaatan Aset Daerah								
	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah		12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Penatausahaan BMD		12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Pengamanan Aset Daerah		12	12	12	12	100	12	60	100
	Kegiatan Penyelesaian Kasus Sengketa Aset		12	12	12	12	100	12	60	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kinerja pada urusan Penunjang bidang Keuangan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan											
1	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan			100	100	100	100	100	100	100	100	
B	Urusan Pemerintahan Bidang Aset Daerah											
1	Persentase Pemanfaatan Aset			65	67,5	70	72,5	62,5	65	65	67,5	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Mekanisme Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai posisi yang strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil dan sarana prasarana yang memadai. Adapun isu - isu terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pembinaan;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana pendukung melalui pemanfaatan, penambahan dan pemeliharaan saran prasarana yang ada;
3. Meningkatkan pengawasan Aset-aset milik Daerah khususnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan tertib administrasi barang daerah;

Sinergi tersebut dimulai dari keselarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan implementasi kegiatan yang integratif.

Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Keuangan telah dilakukan melalui Penyelarasan Penyusunan Dokumen Renstra antara Renstra Kementerian dengan Renstra Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan sinergitas yang optimal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan nasional.

Permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia dari formasi yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, yang masih perlu pengembangan;

3. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.

Permasalahan dan hambatan tersebut tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional, dikarenakan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Capaian target indikator kinerja daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2019 sebanyak 1 Indikator dan telah tercapai keseluruhan, sedangkan capaian target indikator kinerja daerah urusan Keuangan bidang Aset Daerah sebanyak 3 indikator, juga telah tercapai keseluruhan dengan tingkat capaian rata-rata 100%.

Tantangan dalam meningkatkan Pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Pemerintahan bidang Keuangan :

- a. Tersusunnya Kebijakan terkait Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap SDM pengelola keuangan dan aset pada perangkat daerah berkaitan dengan kebijakan promosi dan pergeseran personil.
- c. Sikap profesionalitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah yang menjunjung tinggi nilai integritas;
- d. Terciptanya fungsi pelayanan BLUD pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset berbasis akrual dalam rangka memperoleh opini BPK-RI “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Urusan Keuangan bidang Aset Daerah :

- a) Terpetakannya Aset Daerah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung pemberdayaan aset daerah.
- b) Peralihan kewenangan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) sebagai akibat implementasi Undang-Undang 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi terhadap SDM pengelola administrasi keuangan serta perubahan nilai aset daerah secara signifikan

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan :
 - a) Adanya komitmen Gubernur untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
 - b) Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
 - c) Kebijakan Transaksi Non Tunai dari pemerintah dalam pengelolaan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD guna menjamin akuntabilitas administrasi keuangan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Aset Daerah :

- a) Jumlah Aset Daerah yang bertambah dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pemberdayaan Aset baik kerjasama maupun mekanisme sewa oleh pihak lain
- b) Mengamankan dan menginventarisasi dengan jalan melakukan pemagaran dan pensertifikatan Aset yang sudah tidak bersengketa/kasus.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditindaklanjuti dalam Penyusunan Program dan Kegiatan antara lain :

1. Tata Kelola sesuai kaidah Perundangan
 - a. Belum optimalnya fungsi Perencanaan dikarenakan pengalihan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai akibat pelaksanaan peraturan organisasi perangkat daerah.
 - b. Belum optimalnya kerja fungsional pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan kas daerah, akuntansi serta evaluasi dan pengendalian APBD Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat

- masih sering ditemukannya kesalahan administrasi pengelolaan keuangan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
- c. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur dikarenakan belum adanya program peningkatan kapasitas aparatur khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - d. Kurangnya konsistensi implementasi *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur.
 - e. Masih kurangnya sarana penunjang pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
2. Manajemen dan Administrasi Aset Daerah
- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah yang dapat menghambat pemberdayaan Aset Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lembar..... dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				16.029.536	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				16.029.536	
A	Bidang Keuangan				16.029.536	Bidang Keuangan				16.029.536	
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan	100%	16.029.536	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan	100%	16.029.536	
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100%	607.498	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100%	607.498	
2	Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100 %	7.982.160	Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100 %	7.982.160	
3	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase realisasi serapan APBD	92 %	2.384.986	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase realisasi serapan APBD	100 %	2.384.986	
4	Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	5.054.892	Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	5.054.892	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				5.295.426					5.295.426	
1	Keg Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset BPKAD Jateng	- Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	67,5 %	5.295.426	Keg Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	Kantor Provinsi	- Persentase Pemanfaatan Aset Daerah		5.295.426	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	NON URUSAN				41.538.104	NON URUSAN				41.538.104	
A	NON URUSAN				41.538.104	NON URUSAN				41.538.104	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	41.538.104	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	41.538.104	
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	9 Dokumen	437.284	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	9 Dokumen	437.284	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	28.836.863	Kegiatan Administrasi Keuangan	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	28.836.863	
3	Kegiatan Administrasi Umum	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.995.324	Kegiatan Administrasi Umum	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.995.324	
4	Kegiatan Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	12 bulan	20.000	Kegiatan Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal		20.000	
5	Kegiatan Administrasi Umum (AHD)	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.248.633	Kegiatan Administrasi Umum (AHD)	Kantor BPKAD Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.248.633	
Total Keseluruhan					41.538.104					41.538.104	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN Keuangan					
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota	Provinsi Jawa Tengah	- Prosentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundang-an	100 %	
2	Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Provinsi Jawa Tengah			
3	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Provinsi Jawa Tengah			
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Provinsi Jawa Tengah			
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Jawa Tengah	- Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	67,5 %	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan prioritas nasional antara lain:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produksi;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah, yang melaksanakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Prioritas Nasional yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah tersebut yaitu prioritas nasional ke-3 “Peningkatan Kapasitas Birokrasi”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

- a. Mewujudkan efektivitas efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- b. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;
- c. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi

pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Meningkatnya tertib administrasi sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel;
- c. Meningkatnya tertib administrasi dan efektivitas sistem pengelolaan Kas Daerah;
- d. Meningkatnya tertib dan efektivitas sistem pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- e. Meningkatnya Pemanfaatan Aset Daerah;
- f. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah;
- g. Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor Pemanfaatan Aset.

Tabel 3.1.

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dengan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perubahan TA. 2021

No	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 – 2025		TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD Perubahan TAHUN 2021	
	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN
1	Misi 3 : Terwujudnya kehidupan politik dan Tata Pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggungjawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalisme Aparatur, bebas dari praktik KKN serta pengembangan jejaring.			
	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Daerah untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih,	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah negara kesatuan republik indonesia (nkri) didukung dengan	1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	1. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai Kaidah Perundangan

No	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 – 2025		TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD Perubahan TAHUN 2021	
	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN
	berwibawa, beretika, dan bertanggungjawab, serta mampu mendukung pembangunan Daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender: 1. Meningkatnya Profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karier yang jelas		
			1. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	1. Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah beserta indikatornya yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PERUB TAHUN 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persentase Tata Kelola Pemda yang sesuai Kaidah Perundangan	100 %	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Pemda yang sesuai Kaidah Perundangan	100 %
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset	65 %	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset	67,5 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah serta mempunyai fungsi antara lain penyusunan kebijakan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah, Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah, pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Program adalah bentuk Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra, meliputi:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 diusulkan sebesar Rp.62.863.066.000,00.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 terdiri dari Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah beserta pendanaan yang menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 selama satu tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, sebagaimana pada Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK	PAD	DB	HCHT	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3
												Target			Target										
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.									
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Baik								Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan			%	100				100								Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai Kaidah Perundangan							Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan			%	100				100									Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		4.02.16	5.02.02	Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan			%	100				100									Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
								Persentase penetapan APBD tepat waktu			%	100				100									Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
								Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu			%	100				100									Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi
								Persentase realisasi serapan APBD			%	92				92									Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		4.02.16.005	5.02.02.1.01			Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						7,982,160,000	7,982,160,000		11,640,300,000	0	0	0	0	7,982,160,000				
		4.02.16.006				Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan																			
		4.02.16.007				Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra																			

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK	PAD	DB	BH	CHT	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3
												Target			Target											
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.										
								Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan			OPD	13	2,973,570,000	2,973,570,000	13	3,397,800,000	0	0	0	0				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
								Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD					147,000,000	147,000,000		210,000,000	0	0	0	0						
									Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA dan DPA perubahan SKPD																	
								Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD					2,705,570,000	2,705,570,000		2,872,800,000	0	0	0	0						
									Kegiatan Proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
								Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					121,000,000	121,000,000		315,000,000	0	0	0	0						
									Kegiatan Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan																	
								Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan			OPD	16	1,933,390,000	1,933,390,000	16	4,462,500,000	0	0	0	0				SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN		
								Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					570,900,000	570,900,000		1,050,000,000	0	0	0	0						
									Koordinasi Dan Konsultasi Penyusunan Anggaran Belanja pada SKPD																	
								Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					155,460,000	155,460,000		315,000,000	0	0	0	0						
									Koordinasi Dan Konsultasi Penyusunan Anggaran Pembiayaan pada SKPD																	
								Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					127,795,000	127,795,000		420,000,000	0	0	0	0						
									Koordinasi Dan Konsultasi Penyusunan Anggaran Pendapatan pada SKPD																	
								Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD					437,080,000	437,080,000		735,000,000	0	0	0	0						
									Kegiatan Sosialisasi Permendagri terkait Pedoman Penyusunan APBD TA 2022																	
								Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran					642,155,000	642,155,000		1,942,500,000	0	0	0	0						

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK	PADD	BHCHT	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3
												Target			Target									
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.								
										Kegiatan Finalisasi Bantuan Keuangan Kab/Kota														
										Kegiatan Verifikasi RKO Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota														
								Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan			OPD	14	3.075.200,000	3.075.200,000	14	3.780.000,000	0	0	0	0			SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
								Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD					154,500,000	154,500,000	315,000,000	0	0	0	0					
								Kegiatan Verifikasi RKA dan DPA Murni TA 2022 dan Perubahan TA 2021																
								Penyusunan KUA dan PPAS					202,000,000	202,000,000	315,000,000	0	0	0	0					
								Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS TA 2022																
								Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD					2,718,700,000	2,718,700,000	3,150,000,000	0	0	0	0					
								Koordinasi Proses penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD																
		4.02.16.002	5.02.02.1.02			Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota						607,498,000	607,498,000	2,224,131,000	0	0	0	0	607,498,000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,		
								Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan			Kabupaten/Kota	35	607,498,000	607,498,000	35	2,224,131,000	0	0	0	0			SUB BAGIAN PROGRAM	
								Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				35	224,560,000	224,560,000	35	801,297,000	0	0	0	0				
								Asistensi/koordinasi bidang keuangan daerah di Kabupaten/Kota																
								Forum Koordinasi Kabupaten/Kota Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah																
								Kaji terap pengelolaan keuangan daerah																
								Konsultasi/koordinasi bidang keuangan daerah ke Pemerintah Pusat																
								Monitoring pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah																
								Evaluasi APBD Kabupaten/Kota				35	127,646,000	127,646,000	35	474,278,000	0	0	0	0				

										Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota																															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK	PAD	DB	BH	CH	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3
												Target			Target											
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.										
										Penyampaian hasil evaluasi Gubernur tentang APBD ke Kemendagri																
										Percepatan penyusunan Raperda APBD Kabupaten/Kota																
										Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		35	127,646,000	127,646,000	35	474,278,000	0	0	0	0	0					
										Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
										Penyampaian hasil evaluasi Gubernur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ke Kemendagri																
										Percepatan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
										Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota		35	127,646,000	127,646,000	35	474,278,000	0	0	0	0	0					
										Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kabupaten/Kota																
										Penyampaian hasil evaluasi Gubernur tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota ke Kemendagri																
										Percepatan Penyusunan Raperda Perubahan APBD Kabupaten/Kota																
		4.02.16.003	5.02.02.1.03			Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						2,384,986,000	2,384,986,000		6,166,630,000	0	0	0	0	0	2,384,986,000				
		4.02.16.012				Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan																				
		4.02.16.003				Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah																				
								Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D			OPD	19	730,010,000	730,010,000	19	1,864,642,000	0	0	0	0	0			SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
								Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D					340,180,000	340,180,000		675,339,000	0	0	0	0	0					
								Pelatihan Epenatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran																		

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK	PAD	DB	BH	CH	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3		
												Target			Target													
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.												
										Pelatihan Epenatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran																		
										Pelatihan E- Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran (survey)																		
										Rapat Persiapan Pelatihan E- Penatausahaan																		
										Penatausahaan Pembiayaan Daerah			312,830,000	312,830,000	538,566,000	0	0	0	0									
										Koordinasi dan Laporan Transaksi Non Tunai ke Pusat Monitoring Transaksi Non Tunai Kab/Kota																		
										Pendampingan Pertemuan Transaksi Non Tunai																		
										Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)			77,000,000	77,000,000	650,737,000	0	0	0	0									
										BINTEK PENATAUSAHAAN BID. PERBEND. & KASDA																		
										PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN																		
										Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D	OPD	41	527,806,000	527,806,000	41	1,387,534,000	0	0	0	0				SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA				
										Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP			527,806,000	527,806,000	871,774,000	0	0	0	0									
										Biaya Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi																		
										Pendampingan Penatausahaan Rekonsiliasi PFK Sosialisasi Penatausahaan Provinsi Jawa Tengah																		
										Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			0	0	259,365,000	0	0	0	0									
										Sosialisasi Penatausahaan Provinsi Jawa Tengah dengan kab/kota se- Jawa Tengah																		

								Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			0	0	256,395,000	0	0	0	0																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK	PADDBHCHT	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3
												Target			Target								
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.							
										Rekonsiliasi Provinsi Jawa Tengah													
								Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan			OPD	41	1,127,170,000	1,127,170,000	41	2,914,454,000	0	0	0	0			SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
								Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				41	798,795,000	798,795,000	41	2,065,371,000	0	0	0	0			
										Koordinasi dan pengiriman laporan penerimaan dan penyetoran pajak pusat													
										Pencetakan blangko-blangko penatausahaan													
										Pendampingan aplikasi software pengelolaan kas daerah													
										Rekonsiliasi dan Pemantauan Penyetoran Kas di UPT dan SKPD Provinsi Jawa Tengah													
										Rekonsiliasi dan sosialisasi penerimaan kas daerah dengan pt. bank jateng sejateng													
										Studi Komparasi Penerapan sistem Paperless pada pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas di Pemerintah Daerah													
										Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas dengan badan penghubung													
										Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas skpd provinsi jawa tengah													
									Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				205,150,000	205,150,000		530,471,000	0	0	0	0			
										Rekonsiliasi dan Kordinasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Instansi Terkait													
										Studi Komparasi Pentausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas berbasis paperless													
									Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait				123,225,000	123,225,000		318,612,000	0	0	0	0			
										Rekonsiliasi Perpajakan dengan skpd provinsi jawa tengah													

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK PADDDBHCHT	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3
												Target			Target							
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.						
Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah								Persentase pemanfaatan aset			%	67.5			70							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Terwujudnya manajemen dan administrasi aset daerah							Persentase pemanfaatan aset			%	67.5			70							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		4.02.17	5.02.03	Pengelolaan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Persentase pemanfaatan aset daerah			%	67.5			70							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		4.02.17.001	5.02.03.1.01			Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah						5,295,426,000	5,295,426,000	10,566,483,000	0	0	0	0	5,295,426,000	35 Kabupaten/Kota, Bidang Aset Daerah,	
		4.02.17.002				Penatausahaan BMD																
		4.02.17.004				Penyelesaian Kasus Sengketa Aset																
		4.02.17.003				Pengamanan Aset Daerah																
								Jumlah Aset yang diamankan			Unit	41	1,942,739,000	1,942,739,000	41	3,657,483,000	0	0	0	0		SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH
									Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah				1,942,739,000	1,942,739,000	3,657,483,000	0	0	0	0			
									Belanja Pajak Kendaraan Bermotor													
									Belanja Publikasi Media Cetak													
									Belanja Sewa Gedung/Ruang Rapat/Tempat Untuk Rakor/Desk													
									Pengamanan Aset													
									BPJS Kesehatan													
									Pemeliharaan Aset Daerah													
									Pemeliharaan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													
									Pengamanan Aset Daerah													

										Pengamanan Aset Daerah																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK PADDDBHCHT	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3	
												Target			Target								
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.							
										Pengamanan Aset Daerah													
										Pengamanan, Pemeliharaan Aset Daerah													
										Pengamanan, Pemeliharaan Aset Daerah													
										Rakor/Desk Pengamanan Aset Daerah													
										Rakor/Desk Pengamanan Aset Daerah													
								Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset			Unit	4	1,039,448,000	1,039,448,000	4	1,890,000,000	0	0	0	0		SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					700,000,000	700,000,000		1,050,000,000	0	0	0	0			
										Pelaksanaan appraisal aset pemerintah provinsi													
										Pengembangan aplikasi RKBMD dan RKPBMMD													
										Pengembangan update aplikasi aset yang ada di pengelola													
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah					339,448,000	339,448,000		840,000,000	0	0	0	0			
										Pemeliharaan Gedung/Bangunan Provinsi Jawa Tengah													
										Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4													
								Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD			OPD	43	1,400,000,000	1,400,000,000	43	3,097,500,000	0	0	0	0		SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
								Inventarisasi Barang Milik Daerah					235,000,000	235,000,000		525,000,000	0	0	0	0			
										Inventarisasi hasil pengadaan BMD dan tindak lanjut temuan BPK khusus urusan BMD													
										Rakor inventarisasi BMD													
								Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD					323,000,000	323,000,000		735,000,000	0	0	0	0			
										penyusunan laporan mutasi barang milik daerah													
										Rakor pengelolaan BMD													
								Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah					133,000,000	133,000,000		420,000,000	0	0	0	0			
										Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah													
										pembinaan pengelolaan Barang milik daerah													

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022			DAK	PAD	DB	BH	CH	THT	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3
												Target			Target													
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.	Rp. RAB											
									Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				259,000,000	259,000,000		630,000,000	0	0	0	0								
										Rekonsiliasi laporan BMD																		
										Penatausahaan Barang Milik Daerah			450,000,000	450,000,000		787,500,000	0	0	0	0								
										Penatausahaan BMD Penyusunan Aplikasi Penatausahaan BMD																		
									Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan permasalahan kasus/sengketa		Unit	5	913,239,000	913,239,000	5	1,921,500,000	0	0	0	0						SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH		
									Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah				646,770,000	646,770,000		1,501,500,000	0	0	0	0								
										Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Rakor/Desk Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Rakor/Desk Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Rakor/Desk Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Rakor/Desk Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Rakor/Desk Pemindahtanganan Aset Daerah																		
										Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemsunahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			266,469,000	266,469,000		420,000,000	0	0	0	0								
										Pengawasan Aset Daerah																		
										Pengawasan Aset Daerah																		
										Pengawasan Aset Daerah																		
										Rakor/Desk Pengawasan Aset Daerah																		
										Rakor/Desk Pengawasan Aset Daerah																		
										Rakor/Desk Pengawasan Aset Daerah																		

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Tengah								Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan			Nilai	80			80							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--	---

TUJUAN	SASARAN	KODE LAMA	KODE BARU	PROGRAM RPJMD LAMA	PROGRAM RPJMD PERMENDAGRI 90	KEGIATAN RENSTRA LAMA	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	SATUAN	2021			2022		DAK	PADDBHCHT	Total Jenis Anggaran	Pagu Verifikasi	LOKASI	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggung Uraian Jawab/Unit Kerja Eselon 2 - Eselon 3								
												Target			Target																
												Volume	Rp.	Rp. RAB	Volume	Rp.															
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Tengah							Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan			Angka	80			80								Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								
Total RAB																															

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan Penjabaran dalam Mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Tahapan RPJMD ke IV (Tahun 2019-2024), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta dalam pelaksanaan Renja. Selain itu, Renja sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Penyusunan Renja dilakukan melalui proses panjang mulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, Penyempurnaan Rancangan Renja telah melibatkan penjangkauan aspirasi dan identifikasi permasalahan baik melalui Forum Lintas Perangkat Daerah maupun mekanisme lainnya, serta verifikasi maupun pendampingan penyempurnaan rancangan Renja oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan Pembangunan Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2021 sebelum diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya tahap akhir adalah Penetapan Renja.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pengelolaan Keuangan serta Urusan Pengelolaan Aset Daerah dapat mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2021 yaitu “Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang baik”.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, etos kerja serta semangat gotong-royong seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

Semarang, 2020
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Provinsi Jawa Tengah

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
19700514 199202 1 001